

## **IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH DI SEKOLAH DASAR INPRES LELEJAE KECAMATAN BULU TABA KABUPATEN PASANGKAYU**

**Ike Irmayanti<sup>1)</sup>, Nasrullah<sup>2)</sup>, Rachmad<sup>3)</sup>**

<sup>1</sup>Prodi. Administrasi Publik, FISIP Universitas Tadulako

[\*irmayantiike@gmail.com\*](mailto:irmayantiike@gmail.com)

<sup>2</sup> Prodi. Administrasi Publik, FISIP Universitas Tadulako

[\*ullahfadhil69@gmail.com\*](mailto:ullahfadhil69@gmail.com)

<sup>3</sup> Prodi. Administrasi Publik, FISIP Universitas Tadulako

[\*rachmadmhad8@gmail.com\*](mailto:rachmadmhad8@gmail.com)

### **ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Implementasi Kebijakan Dana Bantuan Operasional Sekolah di Sekolah Dasar Inpres Lelejae dengan menggunakan metode penelitian Kualitatif tipe Deskriptif. Jenis data yang digunakan yaitu data primer dan data skunder dengan teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Jumlah informan berjumlah tujuh orang dengan teknik analisa data Miles Huberman dan Saklara. Penelitian ini menggunakan teori Goerd Edward III dengan empat indikator yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi kebijakan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) telah berjalan dengan cukup baik. Hal tersebut dapat dilihat dari teori George C. Edward III dengan Aspek (1) Komunikasi yang dibangun Kepala Sekolah sudah baik dan jelas terkait informasi dana Bantuan Operasional Sekolah di SD Inpres Lelejae, (2) Sumber Daya yang ada di SD Inpres Lelejae sudah tersedia dan dapat mengelola dana Bantuan Operasional Sekolah dengan baik sesuai dengan prosedur yang berlaku, walaupun fasilitas di sekolah belum diperbaiki semua melalui dana BOS, (3) Disposisi berjalan dengan baik dilihat dari kerjasama antara Kepala Sekolah, guru dan tim pengelola dana Bantuan Operasional Sekolah sudah baik, (4) Struktur birokrasi berjalan dengan baik terbukti dengan komitmen dalam menciptakan kerjasama yang sesuai dengan petunjuk teknis Bantuan Operasional Sekolah.

**Kata kunci:** Implementasi Kebijakan, Dana BOS, Sekolah

### ***ABSTRACT***

*This study aims to determine the implementation of the School Operational Assistance (BOS) Fund Policy at Inpres Lelejae Elementary School using a descriptive qualitative research method. The types of data used are primary and secondary data, with data collection techniques carried out through observation, interviews, and documentation. The number of informants totaled seven people, and data analysis was conducted using the Miles, Huberman, and Saldana model. This study applies the theory of George C. Edward III, which includes four indicators: communication, resources, disposition, and bureaucratic structure. Based on the research results, the implementation of the School Operational Assistance (BOS) fund policy has been running fairly well. This is evident from the application of George Edward III's theory through the following aspects: (1) Communication established by the school principal is clear and effective regarding BOS fund information at Inpres Lelejae Elementary School. (2) Resources available at the school are adequate and capable of managing the BOS funds properly in accordance with applicable procedures, although not all school facilities have been improved using BOS funds. (3) Disposition functions effectively, as seen in the cooperation between the principal, teachers, and the BOS fund management team. (4) Bureaucratic structure runs well, as evidenced by the commitment to establishing cooperation in accordance with the BOS technical guidelines.*

***Keywords: Implementation of policy, BOS funds, schools***

Submisi: 07-07-2025

Diterima: 08-07-2025

Dipublikasikan: 08-08-2025

## PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan pilar utama dalam menciptakan sumber daya manusia yang unggul dan berkualitas. Dalam konteks pembangunan nasional, pendidikan tidak hanya berfungsi sebagai sarana mencerdaskan kehidupan bangsa, melainkan juga sebagai alat strategis untuk mewujudkan kesejahteraan sosial dan ekonomi yang merata. Oleh karena itu, pendidikan harus dijamin aksesibilitas, pemerataan, dan kualitasnya oleh negara, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Tantangan terbesar dalam dunia pendidikan di Indonesia masih berkuat pada aspek pembiayaan, terutama pada jenjang pendidikan dasar. Pemerintah Indonesia telah menetapkan program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun yang bertujuan untuk menjamin setiap warga negara usia sekolah mendapatkan hak pendidikannya secara layak dan bermutu. Dalam upaya mendukung keberhasilan program ini, salah satu kebijakan strategis yang dicanangkan adalah Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

Menurut Mazmanian dan Paul Sabatier, (1983: 5) bahwa kebijakan sebagai suatu program atau kebijakan yang baik di atas kertas namun sulit untuk dirumuskan dalam kata-kata dan slogan-slogan yang menenangkan, serta lebih sulit lagi untuk dilaksanakan secara memuaskan semua pihak. Mereka menekankan bahwa meskipun kebijakan mungkin tampak ideal secara teoritis, penerapannya sering kali menghadapi tantangan dalam pelaksanaannya di lapangan.

Menurut Wahab, (2002: 64) bahwa kebijakan sebagai serangkaian tindakan berpola yang ditetapkan oleh pemerintah dan memiliki tujuan tertentu untuk kepentingan masyarakat. Ia mengutip pandangan Anderson yang mendefinisikan kebijakan publik sebagai kebijakan yang dikembangkan oleh instansi dan pejabat pemerintah.

Program BOS mulai dilaksanakan sejak tahun 2005 dan terus mengalami perbaikan dari sisi regulasi, manajemen, hingga sistem penyalurannya. BOS adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan dialokasikan untuk mendanai kebutuhan operasional non-personalia di satuan pendidikan dasar dan menengah. Kebijakan ini bertujuan meringankan beban pembiayaan pendidikan yang selama ini ditanggung oleh orang tua siswa, khususnya dari kalangan tidak mampu. Berdasarkan Peraturan Menteri pendidikan Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2022, Dana BOS Reguler digunakan untuk mendukung operasional rutin sekolah dalam menyelenggarakan kegiatan pendidikan. Penggunaan dana BOS harus sesuai dengan prinsip akuntabilitas, efisiensi, efektivitas, dan transparansi. Meskipun demikian, pelaksanaan di lapangan tidak selalu berjalan sesuai harapan. Di banyak daerah, termasuk di wilayah terpencil seperti Kecamatan Bulu Taba Kabupaten Pasangkayu, implementasi program BOS sering kali menemui berbagai kendala. Mulai dari keterlambatan penyaluran dana, pemahaman pengelola sekolah terhadap regulasi yang masih minim, hingga kurangnya sarana dan prasarana pendukung yang seharusnya dibiayai oleh dana BOS. Hal ini berdampak langsung terhadap kualitas layanan pendidikan yang diterima oleh siswa.

Sekolah Dasar (SD) Inpres Lelejae adalah salah satu lembaga pendidikan yang menerima alokasi dana BOS. Terletak di Kelurahan Lelejae, Kecamatan Bulu Taba, sekolah ini memiliki jumlah siswa sekitar 135 orang dengan tenaga pendidik sebanyak 14 orang. Dana BOS yang diterima oleh sekolah ini setiap tahunnya sekitar Rp119.380.000, namun permasalahan klasik seperti keterlambatan pencairan, ketidaksesuaian alokasi dengan kebutuhan nyata di lapangan, serta minimnya fasilitas penunjang pendidikan, masih sering terjadi. Lebih jauh, kondisi sosial ekonomi masyarakat sekitar SD Inpres Lelejae juga menjadi tantangan tersendiri. Sebagian besar orang tua siswa berpenghasilan rendah, sehingga tidak mampu menanggung biaya pendidikan tambahan seperti pembelian seragam,

buku, atau peralatan tulis. Ironisnya, meskipun program BOS bertujuan menggratiskan biaya pendidikan dasar, dalam praktiknya siswa masih harus mengeluarkan biaya untuk kebutuhan sekolah, seperti sewa infokus, buku ajar, atau kegiatan praktik belajar.

Menurut Grindle (1980: 10), bahwa keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh dua variabel utama: isi kebijakan (*content of policy*) dan lingkungan implementasi (*context of implementation*). Isi kebijakan mencakup sejauh mana kepentingan kelompok sasaran atau target groups dimuat dalam kebijakan dan jenis manfaat yang mereka terima. Sementara itu, lingkungan implementasi merujuk pada faktor-faktor eksternal yang memengaruhi pelaksanaan kebijakan.

Berdasarkan observasi awal peneliti, ditemukan bahwa pemahaman pihak sekolah mengenai regulasi dan tanggung jawab dalam pengelolaan dana BOS masih belum merata. Hal ini menyebabkan munculnya praktik-praktik yang kurang sesuai dengan petunjuk teknis penggunaan dana BOS. Pengelolaan yang belum efektif tidak hanya berdampak pada keterlambatan operasional sekolah, tetapi juga berisiko menimbulkan kesenjangan kualitas pendidikan antar sekolah. Pelaksanaan kebijakan BOS juga menghadapi persoalan dari sisi birokrasi. Proses pencairan dana yang panjang dan prosedural, mulai dari pengajuan proposal, verifikasi data, hingga pencairan, menjadi hambatan tersendiri. Ketika dana terlambat turun, kegiatan operasional sekolah pun terganggu, sementara kegiatan belajar mengajar tetap harus berjalan. Dalam hal ini, sekolah sering kali harus menalangi terlebih dahulu kegiatan yang seharusnya dibiayai oleh dana BOS, seperti pembayaran honor guru honorer, pengadaan alat tulis, dan biaya kegiatan ekstrakurikuler.

Dalam konteks implementasi kebijakan publik, kebijakan yang baik tidak akan berdampak apabila pelaksanaannya tidak dilakukan secara tepat. George C. Edward III dalam teorinya menyatakan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat faktor utama, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi (sikap pelaksana), dan struktur birokrasi. Keempat faktor ini saling berkaitan dan menentukan efektivitas implementasi kebijakan di tingkat lapangan. Berdasarkan kerangka teori tersebut, implementasi kebijakan Dana BOS di SD Inpres Lelejae menarik untuk diteliti lebih lanjut. Apakah komunikasi antar aktor kebijakan sudah berjalan optimal? Apakah sumber daya yang dimiliki sekolah sudah mencukupi? Bagaimana sikap pelaksana terhadap kebijakan ini? Dan apakah struktur birokrasi sekolah mendukung terlaksananya kebijakan secara efektif?

Penelitian ini juga penting untuk melihat sejauh mana prinsip-prinsip tata kelola yang baik (*good governance*) diterapkan dalam pengelolaan dana BOS di SD Inpres Lelejae. Prinsip-prinsip seperti transparansi, partisipasi, akuntabilitas, serta efisiensi dalam penggunaan anggaran pendidikan sangat diperlukan agar tujuan program BOS dapat tercapai secara optimal. Selain itu, penelitian ini dapat memberikan gambaran nyata mengenai tantangan yang dihadapi sekolah-sekolah dasar di daerah terpencil dalam mengelola dana BOS. Hasilnya diharapkan dapat memberikan kontribusi berupa masukan kebijakan bagi pemangku kepentingan di tingkat daerah maupun pusat, agar pelaksanaan program BOS ke depan menjadi lebih tepat sasaran, berkelanjutan, dan berdampak nyata terhadap peningkatan kualitas pendidikan. Dengan melihat fenomena dan kompleksitas persoalan tersebut, maka peneliti merasa tertarik untuk mengkaji lebih dalam mengenai "Implementasi Kebijakan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di Sekolah Dasar Inpres Lelejae Kecamatan Bulu Taba Kabupaten Pasangkayu". Penelitian ini menggunakan teori implementasi kebijakan George C. Edward III sebagai kerangka analisis untuk memahami sejauh mana efektivitas pelaksanaan program BOS di tingkat sekolah dasar, khususnya dalam konteks wilayah yang memiliki keterbatasan sumber daya dan tantangan geografis. Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut: "Bagaimana implementasi Dana Operasional Sekolah di Sekolah Dasar Inpres Lelejae Kecamatan Bulu Taba Kabupaten Pasangkayu"? Pendahuluan berisi latar belakang, hal

mendasar atau urgensi permasalahan, studi pustaka, dan tujuan dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang melatarbelakangi ditulisnya artikel ilmiah ini. Pendahuluan ditulis dengan font Times New Roman 11pt., tanpa *footnote*.

## **METODE**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif. Pendekatan ini dipilih untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai proses implementasi kebijakan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di Sekolah Dasar Inpres Lelejae, Kecamatan Bulu Taba, Kabupaten Pasangkayu. Kerangka konseptual dalam penelitian ini didasarkan pada teori implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh George C. Edward III. Teori ini menekankan empat variabel utama yang memengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh secara langsung dari informan melalui observasi dan wawancara mendalam, sedangkan data sekunder berasal dari dokumen-dokumen resmi dan arsip yang relevan dengan kebijakan dan pelaksanaan program BOS. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan tiga metode utama: observasi partisipatif, wawancara semi-struktur, dan dokumentasi. Observasi dilakukan untuk mengamati secara langsung pelaksanaan kebijakan di sekolah. Wawancara dilakukan terhadap tujuh informan kunci, yaitu kepala sekolah, bendahara BOS, guru, dan komite sekolah. Dokumentasi digunakan untuk melengkapi data melalui penelaahan terhadap laporan penggunaan dana BOS, petunjuk teknis, dan notulen rapat. Peneliti bertindak sebagai instrumen utama dalam proses pengumpulan data, dengan memposisikan diri sebagai pengamat sekaligus pewawancara yang aktif berinteraksi dengan subjek penelitian. Untuk menjamin keabsahan data, digunakan teknik triangulasi sumber dan metode. Analisis data dilakukan dengan menggunakan model interaktif dari Miles, Huberman, dan Saldana, yang meliputi tiga tahapan utama, yaitu: reduksi data (*data condensation*), penyajian data (*data display*), dan penarikan kesimpulan atau verifikasi (*conclusion drawing/verification*). Proses ini dilakukan secara terus-menerus sejak awal pengumpulan data hingga tahap akhir penulisan laporan penelitian. Lokasi penelitian ditentukan secara purposive, yaitu di SD Inpres Lelejae sebagai subjek utama yang merepresentasikan implementasi program BOS di wilayah terpencil. Penelitian ini dilaksanakan dalam kurun waktu empat bulan, dimulai dari tahap persiapan hingga penyusunan laporan akhir.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Kebijakan sebagai serangkaian tindakan atau tindakan yang disengaja (*purposive course of action or inaction*) yang dilakukan oleh aktor atau sekelompok aktor untuk mengatasi suatu masalah atau persoalan tertentu yang dihadapi, (Anderson, 1990:5).

Kebijakan merupakan serangkaian tindakan terarah yang diambil oleh pemerintah sebagai jawaban terhadap suatu masalah publik, yang bertujuan untuk memecahkan atau mengurangi keburukan serta mendorong kebaikan dalam masyarakat. Ia juga berpendapat bahwa proses kebijakan publik meliputi tahap formulasi (perumusan masalah), implementasi (pelaksanaan), dan evaluasi kebijakan, (Winarno, 2002: 74).

Kebijakan publik merupakan suatu keputusan yang dibuat oleh negara, khususnya melalui pihak pemerintah selaku aktornya, dan sebagai bagian strategi untuk merealisasikan tujuan negara yang bersangkutan, (Nugroho, 2008: 55).

Implementasi kebijakan merupakan bagian dari proses atau siklus kebijakan yang diawali dengan identifikasi isu, penyusunan agenda, analisis kebijakan, pengambilan keputusan, pelaksanaan kebijakan (implementasi), dan diakhiri dengan evaluasi dampak serta umpan balik untuk siklus berikutnya. Tahap implementasi ini merupakan salah satu bagian krusial dalam keseluruhan proses kebijakan untuk mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan, (Badjuri dan Yuwono, 2002:118).

Implementasi kebijakan merupakan proses penting dalam memastikan bahwa suatu kebijakan mencapai tujuannya. Dalam konteks implementasi kebijakan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SD Inpres Lelejae Kecamatan Bulu Taba Kabupaten Pasangkayu, peneliti menggunakan model implementasi George C. Edward III yang mencakup empat variabel utama: komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi.

1. Komunikasi, Komunikasi dalam pelaksanaan kebijakan BOS di SD Inpres Lelejae tergolong cukup baik. Kepala sekolah secara rutin menyampaikan informasi terkait kebijakan dan penggunaan dana BOS kepada guru, staf, dan komite sekolah melalui rapat internal dan dokumentasi yang jelas. Namun, belum semua pihak luar seperti wali murid memperoleh informasi secara transparan, yang dapat menimbulkan kesalahpahaman terkait penggunaan dana BOS. Oleh karena itu, perlu ditingkatkan komunikasi eksternal melalui media informasi sekolah atau forum wali murid.
2. Sumber Daya, SD Inpres Lelejae memiliki sumber daya manusia yang cukup baik dalam pengelolaan dana BOS. Kepala sekolah, bendahara, dan tim pengelola BOS memahami regulasi dan bertugas sesuai petunjuk teknis. Meskipun demikian, keterbatasan fasilitas seperti sarana belajar dan media pembelajaran menjadi tantangan dalam pemanfaatan dana BOS secara maksimal. Dana BOS memang telah membantu kebutuhan dasar, tetapi belum mampu menjangkau pembenahan menyeluruh terhadap fasilitas pendidikan.
3. Disposisi (Sikap Pelaksana), Pelaksana kebijakan di sekolah menunjukkan sikap yang positif dan komitmen tinggi dalam mengelola dana BOS. Hal ini tercermin dari kerjasama yang baik antara kepala sekolah, guru, dan tim pengelola dalam menyusun rencana dan laporan pertanggungjawaban. Namun, tantangan tetap ada, terutama terkait ketepatan waktu pelaporan dan tekanan administratif yang cukup tinggi, yang kadang mengganggu fokus utama dalam pengajaran.
4. Struktur Birokrasi Struktur birokrasi di SD Inpres Lelejae berjalan sesuai dengan pedoman dan regulasi yang berlaku. Terdapat pembagian tugas yang jelas, serta keberadaan standar operasional prosedur (SOP) dalam pengelolaan dana BOS. Kesesuaian ini mempermudah koordinasi dan pengambilan keputusan terkait penggunaan dana. Meskipun demikian, proses pencairan dana dari tingkat pusat hingga ke sekolah masih membutuhkan waktu cukup lama, sehingga terkadang menghambat pelaksanaan kegiatan operasional sekolah. Secara umum, implementasi kebijakan BOS di SD Inpres Lelejae sudah berjalan cukup baik. Hal ini ditandai dengan pemahaman terhadap aturan, pembagian tugas yang jelas, serta adanya komitmen dari para pelaksana. Namun, masih terdapat beberapa kendala seperti minimnya transparansi eksternal dan keterlambatan pencairan dana.

Implementasi kebijakan dana BOS, di SD Inpres Lelejae Kecamatan Bulu Taba Kabupaten Pasangkayu secara positif dapat membantu operasional sekolah sehingga siswa tidak lagi dibebankan biaya pendidikan, tersedianya buku dan sarana sederhana yang mendukung pembelajaran, dan memberi peluang honor untuk tenaga pendidik non-PNS. Namun, terkendala pada keterbatasan kompetensi teknis bendahara sekolah, akses jaringan internet yang menghambat input laporan BOS, dan partisipasi komite dan masyarakat belum optimal dalam pengawasan, serta jumlah dana yang diterima masih terbatas dibanding kebutuhan riil sekolah. Sehingga, dalam hasil penelitian ini implementasi kebijakan Dana BOS di SD Inpres Lelejae Kecamatan Bulu Taba Kabupaten Pasangkayu sudah berjalan sesuai

regulasi, namun efektivitasnya masih dipengaruhi faktor sumber daya manusia, infrastruktur teknologi, dan keterlibatan masyarakat. Penguatan kapasitas bendahara sekolah, peningkatan peran komite, serta dukungan infrastruktur internet sangat penting untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan BOS.

## **SIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SD Inpres Lelejae Kecamatan Bulu Taba Kabupaten Pasangkayu telah berjalan dengan cukup baik. Hal ini tercermin dari empat indikator menurut teori George C. Edward III, yaitu aspek komunikasi yang terbangun antara pelaksana internal sekolah tergolong baik, meskipun komunikasi dengan eksternal seperti orang tua siswa perlu ditingkatkan. Sumber daya manusia yang dimiliki sekolah sudah memadai, namun fasilitas fisik sekolah masih memerlukan peningkatan. Disposisi pelaksana menunjukkan komitmen dan tanggung jawab tinggi dalam menjalankan program BOS. Struktur birokrasi telah berjalan sesuai SOP dan regulasi yang berlaku, walaupun pencairan dana masih menghadapi keterlambatan secara sistemik. Dengan demikian, untuk meningkatkan efektivitas implementasi kebijakan BOS, perlu dilakukan perbaikan dalam aspek komunikasi publik, percepatan proses birokrasi pencairan dana, serta peningkatan fasilitas sekolah agar tujuan pendidikan yang merata dan berkualitas dapat tercapai secara maksimal. Isi simpulan ditulis Times New Roman 11. Simpulan merupakan ikhtisar dari kegiatan yang telah dilakukan dan bukan merupakan ringkasan dari hasil pembahasan yang mengacu pada teori tertentu.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Anderson, J. E. 1990. *Public Policy Making*. Boston: Houghton Mifflin Company.
- Badjuri, A., & Yuwono, B. 2002. *Implementasi Kebijakan Publik*. Jakarta: Ghalia Indonesia. Budiman
- Winarno, B. 2002. *Kebijakan Publik: Teori dan Proses*. Yogyakarta: Media Pressindo.
- Wahab, S. A. 2002. *Analisis Kebijakan: Dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Grindle, M. S. 1980. *Politics and Policy Implementation in the Third World*. Princeton: Princeton University Press.
- Mazmanian, D. A., & Sabatier, P. A. 1983. *Implementation and Public Policy*. Glenview: Scott, Foresman.
- Nugroho, R. 2008. *Public Policy*. Jakarta: Elex Media Komputindo.

## **TENTANG PENULIS**

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, Nama saya, Ike Irmayanti, lahir di Desa Lelejae, Kecamatan Bulu Taba, Kabupaten Pasangkayu dan telah menyelesaikan studi di Program Studi Administrasi Publik, FISIP Universitas Tadulako Palu tahun 2025.